



RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

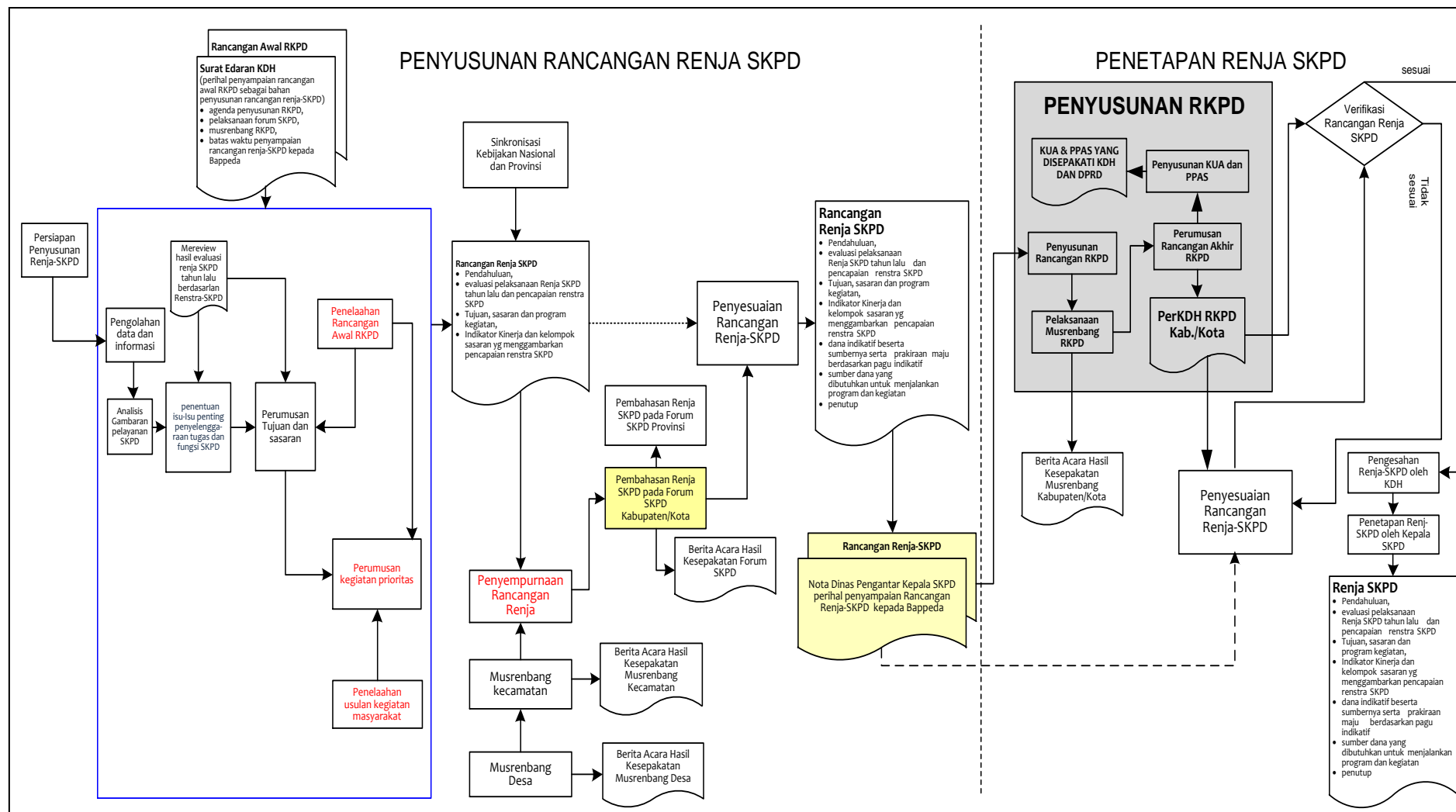
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Satpol PP Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.”**.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2022

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;

2. Tersedianya dokumen rincuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunannasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.6. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2014

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Satpol PP.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 Anggaran Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dilaksanakan oleh Satpol PP sebesar Rp. **11.309.836.963,00** yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. **11.309.836.963,00**. Dengan total realisasi sebesar Rp. **1.443.300.724,00** (12,76 %) Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Belanja Langsung (BL)	6.718.709.212,50	923.916.782	13,75				
II	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	6.718.709.212,50	923.916.782	13,75				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	817.196.409,00	0	0	Persentase penanganan perda dan trantibum	100	100	100,00
1.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	508.955.989	0	0				
1.2	Penegakan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	216.271.804	0	0				
1.3	Pembinaan /Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	92.068.616	0	0				
3.	Program Peningkatan kesiagaan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	587.565.447,00	33.878.889,00	5,77	Jumlah Kejadian Bencana alam Kebakaran	60 Kali	86 Kali	83,3
3.1.	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	487.246.204	9.205.590	1,89	Jumlah Sosialisasi dan Simulasi Kebakaran	1 Dok	1 Dok	85,9
3.2	Investigasi Kejadian Kebakaran	8.140.260	0	15,00	Jumlah Pelayanan Pemadaman Kebakaran	125 Orang	125 Orang	80,2
3.3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	92.178.983	24.673.299	26,77	Jumlah sarpras yang tersedia dan perbaikan kendaraan	5 jenis	5 Jenisil	95,0
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.689.210.200	341.401.973	20,21	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	103,94	103,94
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.205.098	0	0	Jml Surat yang terkirim	1000 surat	1124 surat	112,40
					Jml Tagihan	3 jenis	3 jenis	100
					Tlp, Listrik dan air	9 roda	9 roda	100
					Jml pepanjangan izin kendaraan dinas	30 roda	empat 30	
						dua 25 jenis	dua 25	100
					Jml jenis alat kebersihan	2 jenis	jenis	100
					Jml perlengkapan	8 orang	2 jenis	100

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.829.689.776	670.401.142	9,82	kantor Jml pembayaran honor Jml Pembayaran honor Banpol PP Jml alat tulis kantor Jml cetak dan penggandaan Jml alat listrik bangunan kantor Mamin rakor luar, rakor dalam, mamin bln puasa	100 org 47jenis 11 jenis 7004 lb 15 jenis 3 jenis	8 orang 100 org 47jeni s 11 7004 lb 15 jenis 3 jenis	100 100 100 100 100
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.034.000	0	0	Terlaksananya rakor ke luar dan dlm daerah	2jenis	2 jenis	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.389.994	14.152.180	4,86	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	72%	72
5.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.170.652	0	0	Pembangunan gedung Damkar Pemeliharaan gedung kantor	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	100,00 100,00
5.3	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2.221.807.872	521.897.149	23,49	Servis kendaraan dinas operasional	2 jenis	2 jenis	100,00
5.4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.992.000	2.971.364	1,35	Pengadaan perlengkapan kantor Perbaikan perlengkapan	6jenis	6 jenis	100,00
5.7	Penataan Organisasi	16.852.997	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	200stel	200ste l	100,00
Jumlah		11.309.836.963,00	1.443.300.724,00	12,76				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 12,76 % atau dapat dikategorikan baik.

.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Satpol PP sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024 memuat 3 program dan 14 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Satpol PP sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/bidang/urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (outcome)	Targer Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	05	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat								
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100			100		
1	05	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100			100	

1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100		100			100		
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100		100			100		
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		100			100		
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		100			100		
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		100			100		
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		100			100		
			2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		100			100		
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Ketertiban	100 %		100 %			100 %		

					Umum							
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penanganan gangguan yang tertangani - Persentase Anggita Linmas dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP 	100 %		100 %			100 %	
						30 Orang		30 Orang			30 Orang	
						5 unit		5 unit			5 unit	
			2.02	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sosialisasi Penegakan PerdKabupaten Sampang dan Perbub - Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang 	1 Perbub daPerdan 14		1 Perbub daPerdan 14			1 Perbub daPerdan 14	
			2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3 Orang		3 Orang			3 Orang	

1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani								
1	05	01	2.01	Pencegahan Pengendalian pemedaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah/Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani - Jumlah Sarpras Damkar yang terpenuhi - Jumlah Sarpras kebakaran yang terstandarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit 			
1	05	01	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%		100%		100%			
10	05	01	22.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	10 kali		10 kali		10 kali			

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Satpol PP sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2020 dan 2021 nihil, dikarenakan Periode Renstra SATPOL PP adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2021 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2021 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Bappelitbangda yang baru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2020-2021 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Bappelitbangda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kabupaten Sampang

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
a	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum				100	100	100		100	100	100	
b	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif				100,00	100,00	100,00		100	100	100	
c	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani				80,00	85,00	90,00		80	85	90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Bappelitbangda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas

perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Bappelitbangda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal;
2. Koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda masih belum optimal;
3. SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas;
4. Usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Satpol PP Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan

Tupoksi Satpol PP Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

2.4

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Sampang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Alisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100	11.309.942.549					9.442.241.755	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	9.423.400.307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	8.466.904.089	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	15.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	10.203.970	
	AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	6.675.822.514	AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	5.502.179.373	
	AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan	100	200.000.000	AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan	100	286.440.000	

			kapasitas aparatur					kapasitas aparatur			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	130.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	122.266.862	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	35.847.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	3.256.510	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	2.221.730.793	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	2.370.957.374	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	130.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Satpol PP	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	171.600.000	
	Penataan Organisasi	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	15.000.000	Penataan Organisasi	Satpol PP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	0	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Pelangggran Perda dan Ketertiban Umum	100 %	1.097.694.828	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Pelangggran Perda dan Ketertiban Umum	100 %	522.574.925	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	14 Kecamatan	- Jumlah Penanganan gangguan yang tertangani - Persentase Anggita Linmas	100 % 30 Orang	697.894.828	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	14 Kecamatan	- Jumlah Penanganan gangguan yang tertangani - Persentase Anggita Linmas	100 % 30 Orang	330.014.544	

			<p>dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>- Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP</p>	5 unit				<p>dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>- Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP</p>	5 unit		
	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bid. Perda dan Masyarakat Kabupaten Sampang	<p>- Persentase Sosialisasi Penegakan Perda Kabupaten Sampang dan Perbud</p> <p>- Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang</p>	1 Perbub daPerdan 14	300.000.000	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bid. Perda dan Masyarakat Kabupaten Sampang	<p>- Persentase Sosialisasi Penegakan Perda Kabupaten Sampang dan Perbud</p> <p>- Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang</p>	1 Perbub daPerdan 14	141.482.321	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Bid. Perda dan Masyarakat Kabupaten Sampa	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3 Orang	100.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Bid. Perda dan Masyarakat Kabupaten Sampang	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3 Orang	51.078.060	

		ng									
	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase kejadian kebakaran yang ditangani		788.847.414	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase kejadian kebakaran yang ditangani		452.762.741	
	Pencegahan Pengendalian pemedaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah/Kabupaten/Kota	Se Kabupaten Sampang	- Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani - Jumlah Sarpras Damkar yang terpenuhi - Jumlah Sarpras kebakaran yang terstandarisasi	- 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit	650.647.553	Pencegahan Pengendalian pemedaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah/Kabupaten/Kota	Se Kabupaten Sampang	- Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani - Jumlah Sarpras Damkar yang terpenuhi - Jumlah Sarpras kebakaran yang terstandarisasi	- 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit	400.958.538	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kabupaten Sampang	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	12.425.458	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kabupaten Sampang	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	11.137.020	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Se Kabupaten Sampang	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	10 kali	125.774.403	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Se Kabupaten Sampang	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	10 kali	40.667.183	

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2020 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap pprogram dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

Perangkat Daerah : Satpol PP Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Satpol PP pada dasarnya adalah sebagai Anggaran Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan menunjang pada pembangunan secara umum , sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema RKP tahun 2021 adalah **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**,

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara propinsi dan daerah.

- A.** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang mempunyai tugas dan fungsi:
1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);
 2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran) dan tugas pembantuan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan.
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris membawahi :
 1. Subag Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Unsur Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum membawahi :
 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
 2. Seksi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah; dan
 3. Seksi Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah.
- d. Unsur Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa; dan
 3. Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat.
- e. Unsur Bidang Kebakaran membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran;
 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan
 3. Seksi Perbekalan Pemadam Kebakaran.
- f. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Kelompok Fungsional Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)

Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Adapun prioritas nasional, Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang terkait dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan Berkualitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermurtabat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program prioritas Kabupaten Sampang.

Tabel Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 sbb :

NO	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Berdasarkan PMDN 17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2022	Target Nasional Tahun 2022
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	%		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	100
	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu		100	100
	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu		100	100
	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		100	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	100
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	100
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	100

	Persentase Penanganan Pelangggran Perda dan Ketertiban Umum		100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penanganan gangguan yang tertangani - Persentase Anggita Linmas dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP 		100 % 30 Orang 5 unit	100 % 30 Orang 5 unit
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sosialisasi Penegakan PerdKabupaten Sampang dan Perbub - Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang 		1 Perbub daPerdan 14	1 Perbub daPerdan 14
	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		3 Orang	3 Orang
	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani			
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani - Jumlah Sarpras Damkar yang terpenuhi - Jumlah Sarpras kebakaran yang terstandarisasi 		<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit
	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi		100%	100%
	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan		10 kali	10 kali

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sampang adalah :

1. Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terbinanya masyarakat, aparatur dan badan hukum yang taat dan sadar terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
3. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.
4. Melaksanakan tindakan Refresif Non Yudisial terhadap masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat.
6. Terwujudnya masyarakat yang merasa aman dari bencana dan bahaya kebakaran.
7. Terwujudnya aparatur yang terampil dan terlatih dalam penanggulangan bencana kebakaran.
8. Tercapainya kebersamaan dalam hal penanggulangan bencana kebakaran.
9. Terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Sasaran program jangka menengah OPD adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi bagi masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap semua peraturan daerah
2. Tercapainya kualitas dan kuantitas yang baik terhadap sarana dan Satuan Pol PP dan Damkar Kab.Sampang Renja Tahun 2021 prasarana serta sumber daya aparatur.
3. Tercapainya kondisi tertib, nyaman dan tentram serta damai.
4. Terciptanya kondisi keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
5. Termotivasinya anggota polisi pamong praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugasnya.
6. Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.
8. Meningkatnya masyarakat yang merasa aman dan tentram dari bencana dan bahaya kebakaran.
9. Tersedianya aparatur yang sudah terlatih dan siaga terhadap bencana dan bahaya kebakaran.

10. Tersedianya keperluan administrasi kantor, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas di OPD pemadam kebakaran.
11. Meningkatnya kebersamaan dalam mengatasi bencana kebakaran dengan lintas sektoral.
12. Meningkatnya masyarakat yang peduli akan pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Dalam tahun anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sampang telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat terhadap semua peraturan daerah, Menciptakan kondisi tertib, nyaman dan tentram serta damai, Menciptakan kondisi keamanan dan perlindungan masyarakat, serta meningkatnya kesiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu Jumlah tingkat penyelesaian ketertiban, ketentraman, keindahan K3, Jumlah penegakan perda, Satuan Pol PP dan Damkar Kab. Sampang Renja Tahun 2021.

Persentase penegakan perda, Jumlah polisi pamong praja, Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Cakupan patroli petugas Satol PP, Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas), Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten, Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu, serta Tingkat waku tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Target Jumlah tingkat penyelesaian ketertiban, ketentraman, keindahan K3, Jumlah penegakan perda, Persentase penegakan perda, Jumlah polisi pamong praja, Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Cakupan patroli petugas Satol PP, Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas), Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten, Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu, serta Tingkat waku tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sampang tahun 2021

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Satpol PP pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Sampang
Tahun 2021**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Angka Kriminlitas	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yg terselesaikan	100
				Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	100
	Meningkatkan Kualitas Perlindungan masyarakat	Persentase Anggota Satlinmas yg memenuhi Kualifikasi PAM Swakarsa dan Tanggab Bencana	Meningkatkan Pemenuhan Anggota Satlinmas dalam Kegiatan PAM Swakarsa	Rasio Jumlah Anggota satlinmas terhadap Jumlah RT/Dusun	35
	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran	Penambahan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	Cakupan bencana Kebakaran di Kabupaten Sampang	50

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satpol PP Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Bappelitbangda mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- a. RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
- b. Penegakan Perda dan Perkada;
- c. Pemenuhan Anggota Satlinmas dalam Kegiatan PAM Swakarsa;
- d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Menjaga keamanan Lingkungan/Wilayah;
- e. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Berdasar hasil analisa kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun 2022 maka telah ditentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan, Unsur Penunjang Perencanaan dan Penelitian dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.309.942.549

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan **3 program dan 14 kegiatan**, dengan rincian terlampir.

Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					APBD	APBD Prov.	APB N				Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
5.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDAKETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.309.942.549	-	-	11.309.942.549			14.000.000.000
5.01.5.01.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Presentasepemen uhanadministrasi perkantora		100%	9.423.400.307			9.423.400.307		100%	10.000.000.000
5.01.5.01.01.01.01.	Perencanaan,,Pe nganggaran1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasepemu hanadministrasiper kantora	Satpol PP Kab. Sampang	100 %	15.000.000			15.000.000		100 %	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantora		100 %	6.675.822.514			6.675.822.514		100%	6.675.822.514
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur		100 %	200.000.000			200.000.000		100 %	200.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantora		100 %	130.000.000			130.000.000		100 %	130.000.000
5.01.5.01.01.01.02.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Kab. Sampang	100 %	35.847.000			35.847.000		100 %	35.847.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APB N	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
5.01.5.01.01.01.03.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantora	Luar Daerah dan dalam Daerah	100 %	2.221.730.793			2.221.730.793		100 %	2.221.730.793
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100 %	130.000.000			130.000.000		100 %	130.000.000
	Penataan Organisasi	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan tepat waktu		100 %	15.000.000			15.000.000		100 %	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
5.01.5.01.01.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelangggran Perda dan Ketertiban Umum		100%	1.097.694.828			1.097.694.828		100%	1.097.694.828
.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Penanganan gangguan yang tertangani - Persentase Anggita Linmas dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP	14 Kecamatan		697.894.828			697.894.828		100%	697.694.828
	Penegakan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	- Persentase Sosialisasi Penegakan Perda Kabupaten Sampang dan Perbub - Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap	Bid. Perda dan Masyarakat se Kabupaten Sampang		300.000.000			300.000.000		100%	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang									
	Pembinaan /Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Bid. Perda dan Masyarakat se Kabupaten Sampang		100.000.000			100.000.000		100%	100.000.000
1.05..04.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kabakaran yang tertangani		100%	788.847.414			788.847.414		100%	788.847.414
1.05..04.2.01	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun	- Pelayanan Penanganan Kebakaran yang tertangani	Kab. Sampang 14 Kecamatan kelurahan dan desa	- 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit	650.647.553	-	-	650.647.553	-	- 90 Kejadian	650.647.553

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota										
1.05..04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi	Kab. Sampang	100%	12.425.458			12.425.458		100%	12.425.458
1.05..04.2.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	Se Kabupaten Sampang	10 kali	125.774.403			125.774.403		100%	125.774.403

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. SURYANTO, MM
NIP. 19680310 198809 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Satuan Polisi Pamong Praja mengampu urusan Unsur Penunjang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Program-program Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan “PENINGKATAN HARMONISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT ” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerjadan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Tahun 2022

kode	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Pagu Pendanaan 2022
A	Pendapatan			
C	Belanja Langsung			11309942549
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDAKETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100 %	11309942549
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Presentasepemenuhan administrasiperkantora	100 %	9.423.400.307
1.05.01.2 .01	Perencanaan,,Penganggaran1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasepemenuhanadmi nistrasiperkantora	100 %	15.000.000
1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasepemenuhanadmi nistrasi perkantora	100 %	6.675.822.514
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	200.000.000
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentasepemenuhanadmi nistrasi perkantora	100 %	130.000.000
1.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	35.847.000
1.05.01.2 .08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentasepemenuhanadmi nistrasi perkantora	100 %	2.221.730.793
1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	130.000.000
1.05.01.2 .13	Penataan Organisasi	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	15.000.000
1.05.2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelangggran Perda dan Ketertiban Umum	100 %	1.097.694.828
1.05.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	- Jumlah Penanganan gangguan yang	100 %	697.894.828

	Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> tertangani - Persentase Anggita Linmas dan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Kelengkapan dalam menunjang Kinerja Anggota Satpol PP 	<p>30 Orang</p> <p>5 unit</p>	
1.05.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sosialisasi Penegakan Perda Kabupaten Sampang dan Perbud - Persentase Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbud Kabupaten sampang 	1 Perbud daPerdan 14	300.000.000
1.05.2.03	Pembinaan /Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3 Orang	100.000.000
1.05..04	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani		788.847.414
1.05..04. 2.01	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani - Jumlah Sarpras Damkar yang terpenuhi - Jumlah Sarpras kebakaran yang terstandarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 kali kejadian, - 8 unit, - 6 unit 	65.0647.553
1.05..04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	- jumlah sarpras/proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	12.425.458
1.05..04. 2.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	- jumlah sosialisasi kebakaran yang dilaksanakan	10 kali	125.774.403

Pada tahun 2022 Wajib akan melaksanakan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. dengan total anggaran Rp. 12.045.171.812 yang terdiri Belanja Langsungs sebesar Rp **11.309.942.549** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 3 program dan 14 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Satpol PP dan lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu

“Peningkatan kontribusi sector unggulan yang didukung oleh ketersediaan infra struktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran dari tujuan Satpol PP Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “ Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat .”

Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Satpol PP yang telah dituangkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Satpol PP adalah **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan”** dan **“Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu** “yang didukung oleh dua sasarnya itu :**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dan Meningkatkan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta konflik sosial.**

Pada tahun 2021 Wajib akan melaksanakan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. dengan total anggaran Rp. 12.045.171.812. yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar 12.045.171.812 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 3 program dan 14 kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Satpol PP dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAI